



## **DAMPAK PELAKU PIDANA KORUPSI BAGI MASYARAKAT**

**Muhammad Farhan Bramudia<sup>1</sup>, Adji Damar Asmoro<sup>2</sup>, Tubagus Mido Hossam<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Universitas Islam Sumatera Utara Jl. SM. Raja Teladan Barat Kota Medan, Sumatera Utara  
20217

Korespondensi penulis : [fbramudia@gmail.com](mailto:fbramudia@gmail.com)

***Abstract** : Corruption is a form of crime that has widespread and profound impacts on a country's social, economic, and political structures. This study aims to examine the impact of corruption on society, particularly in relation to social welfare and the national development process. The research approach used is a literature review of previous research findings and relevant legal provisions. The research findings indicate that corruption causes financial losses to the state, reduces the quality of public service delivery, undermines moral values within society, and undermines public trust in government institutions. Therefore, ongoing preventive and repressive measures are needed to minimize corrupt practices and achieve transparent, clean, and integrated governance.*

***Keywords**: corruption, social impact, corruption, public services*

**Abstrak** : Korupsi merupakan bentuk tindak kejahatan yang menimbulkan dampak luas dan mendalam terhadap struktur sosial, ekonomi, serta politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsekuensi tindak pidana korupsi bagi masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial dan proses pembangunan nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah studi literatur terhadap hasil penelitian sebelumnya dan ketentuan hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara, menurunkan kualitas penyelenggaraan layanan publik, merusak nilai moral dalam masyarakat, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan proses preventif maupun represif berkesinambungan untuk meminimalkan praktik korupsi sebagai wujud penata kelola pemerintah yang terlihat jelas, bersih, dan berintegritas.

**Kata kunci**: korupsi, dampak sosial, tindak pidana korupsi, layanan publik

### **LATAR BELAKANG**

Korupsi dapat diibaratkan sebagai sebuah lingkaran setan yang telah merambah hampir seluruh aspek, mulai dari sistem perekonomian, sistem politik, hingga sistem penegakan hukum. Meskipun berbagai kampanye antikorupsi semakin gencar dilakukan, jumlah kasus korupsi yang terungkap justru terus meningkat dan melibatkan pejabat pada berbagai tingkatan, dari daerah hingga pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya memberikan penanganan optimal terhadap tindak pidana korupsi melalui pembentukan berbagai perangkat hukum, termasuk undang-undang. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang bahwa negara memerlukan formula yang lebih efektif untuk menyembuhkan “penyakit sosial” yang bernama korupsi.<sup>1</sup>

Tindakan korupsi secara nyata menimbulkan kerugian terhadap hidup manusia dalam bidang ekonom ataupun dalam tatanan budaya dan norma sosial. Sampai saat ini korupsi masih menjadi faktor utama dan juga penyakit yang dihadapi oleh negara maju ataupun negara berkembang diberbagai belahan dunia. Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai negara berupaya melakukan pemberantasan melalui penerapan regulasi khusus serta pembentukan wadah sebagai penanganan anti korupsi. Negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat kejahatan korupsi yang tergolong tinggi, membentuk wadah antikorupsi yang diketahui sebagai Komisi Pemberantasan

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko, Amalia Syauket, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, Bina Mulia Hukum Volume 11 No .2 (2022) Hal 178

Korupsi atau disingkat KPK. Lembaga ini didirikan pada 2002 sesuai dengan Uu No. 30 Tahun 2002 Tindakan kejahatan korupsi secara nyata menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bisa dalam bidang ekonomi ataupun dalam tatanan budaya bahkan norma sosial. Hingga kini, korupsi masih termasuk dalam perilaku negatif kronis yang dihadapi oleh negara-negara berkembang bahkan negara maju. Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai negara berupaya melakukan pemberantasan melalui penerapan regulasi khusus serta pembentukan wadah antikorupsi sebagai tempat eksekusi. Negara Indonesia merupakan negara dengan angka korupsi yang tinggi sudah membentuk lembaga antikorupsi yang banyak orang ketahui sebagai tempat menangani kasus korupsi baik besar maupun kecil yaitu KPK.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan permasalahan global yang memberikan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat di Indonesia, perilaku korupsi tidak hanya memberikan pengaruh bagi negara, akan tetapi sangat memengaruhi struktur sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung. Tindak pidana ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya demi memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa korupsi tidak semata-mata terkait aspek hukum, melainkan juga berkaitan dengan persoalan moralitas, budaya, dan dinamika sosial yang bersifat kompleks.

Kasus korupsi merupakan persoalan yang terus berulang dan belum terselesaikan di Indonesia. Sebagian besar pelaku korupsi muncul dari kalangan petinggi politik yang punya hak otoritas dalam struktur pemerintahan. Tindakan koruptif sudah dipraktikkan oleh pejabat negara, hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi negara, tetapi juga menghambat pemenuhan kepentingan publik secara luas. Di Indonesia, praktik korupsi telah berkembang secara sistemik dan meluas pada berbagai institusi pemerintahan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara upaya pemberantasannya masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Fenomena ini erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan, di mana otoritas jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Korupsi pada umumnya bermula dan berkembang pada sektor publik dan BUMN, karena posisi strategis para pejabat memungkinkan mereka untuk menekan atau memeras pihak yang bergantung pada layanan pemerintah.

Agustino & Fitriani menyatakan bahwa bentuk korupsi terbesar di Indonesia terjadi pada APBN/APBD melalui pembangunan. Selaras dengan hal tersebut, Azuz (2020) menjelaskan bahwa lebih dari 45% anggaran pendapatan belanja negara sudah dikelompokkan untuk perolehan barang dan jasa, dengan nilai belanja mencapai lebih dari Rp1.200 triliun pada tahun 2020, dan terus meningkat seiring kemajuan pembangunan nasional. Sesuai yang telah disampaikan oleh kpk, sejauh periode 2004–2019 terdapat lebih dari 820 kasus korupsi yang berhasil ditangani, di mana sekitar 70% di antaranya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa melalui praktik suap, gratifikasi, pembayaran fee proyek, dan kickback. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh proses tender pemerintah tidak luput dari praktik korupsi.

Salah satu contoh kasus korupsi yang bersumber dari anggaran APBN adalah proyek pembangunan shelter untuk tsunami di Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten. Pembangunan shelter tersebut dimulai pada tahun 2014, dengan anggaran sebesar Rp18,2 miliar dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dikementerian PUPR, dan dikerjakan oleh PT Tidar Sejahtera. Proyek ini dirancang sebagai sarana evakuasi apabila terjadi tsunami.

<sup>2</sup> Nandha Risky Putra, Korupsi Di Indonesia : Tantangan perubahan Sosial ,Integritas : jurnak Anti Korupsi Vol 8 No 1 (2022), Jawa Barat ,hal 13

Namun, pada tahun 2015 proyek tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian karena pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan akan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, maka dari itu sempat dihentikan pihak kontraktor. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan kerugian negara mencapai Rp16 miliar. Bangunan tiga lantai tersebut kemudian terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan saat tsunami melanda kawasan tersebut pada tahun 2018. Pemilihan kasus ini sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansi dengan isu korupsi dalam pembangunan fasilitas publik, serta karena masih terbatasnya penelitian sebelumnya mengenai kasus ini, sehingga studi ini semoga dapat memiliki peran baru dalam kajian antikorupsi di Indonesia.<sup>3</sup>

Korupsi juga menyebabkan terjadinya distorsi dalam alokasi sumber daya, menghambat arus pendanaan diluar dan dalam negeri, serta menurunkan tingkat daya jual indonesia dalam lingkup global. Praktik korupsi menimbulkan keraguan dalam aspek hukum bahkan ekonomi, sehingga mengurangi minat orang untuk menanamkan modalnya. Konsekuensinya, perkembangan ekonomi menjadi sulit berkembang, angka tunakarya naik, dan kesenjangan sosial- ekonomi semakin meluas.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode kualitatif menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Studi ini dipakai karena penelitian kali ini berfokus pada analisis konsep, data, dan temuan yang bersumber dari berbagai literatur terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat. Seluruh data pada studi ini pada buku-buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang- undangan, laporan lembaga resmi, hingga penelitian terdahulu yang masih relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Ekonomi**

Korupsi menimbulkan kerugian yang signifikan dari berbagai segi kehidupan nasional hingga internasional, khususnya pada bidang ekonom yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan masyarakat yang sejahtera. Praktik ini memperlambat peningkatan ekonomi serta menimbulkan biaya operasional di bagian swasta, baik melalui pembayaran ilegal maupun risiko ketidakpatuhan terhadap kontrak. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa korupsi dapat menurunkan biaya dengan mendorong birokrat untuk lebih mudah mengeluarkan aturan dan regulasi baru, suatu kondisi yang kerap disebut sebagai praktik “pelicin”

Korupsi juga berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap aktivitas bisnis. Inefisiensi perusahaan dapat meningkat karena adanya perlindungan tidak wajar dari persaingan sebagai akibat dari intervensi regulasi pemerintah. Ketika korupsi mendominasi sektor ekonomi semua masalah akan muncul secara terstruktur. Dampaknya dari perekonomian yang timbul diantaranya adalah terhambatnya progres ekonomi dan menurunnya pendanaan yang masuk. Progres ekonomi serta jalur investor pada negara cenderung melemah saat praktik korupsi terjadi secara meluas. Pada bagian swasta, korupsi buat biaya usaha akibat keuntungan yang hilang dikarenakan pembayarannya secara ilegal,

---

<sup>3</sup> Susi Amalia, Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di kecamatan Labuan Kabupaten Padeglang, Pistemik Indonesia Jurnal Of Sosial And Political Sciensces volume 3 no 1, Banten 2022

<sup>4</sup> Layla Hanisa, Anggun pratiwi, tries ellia sandari, Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi : Analisis Studi Kasus Di Negara Indonesia, Jurnal Kendali Akuntansi Volume 3, No .3 (2025) Hal 125

meningkatnya waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk bernegosiasi dengan pejabat korup, serta risiko pembatalan kontrak sebagai konsekuensi dari proses investigasi.<sup>5</sup>

Mauro (1995) menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif untuk korupsi dan juga indikator ekonom makro. Hal tersebut menjelaskan bahwa perilaku korupsi itu berkaitan antara rendahnya tingkat investasi dan lambatnya peningkatan ekonomi, serta berkurangnya alokasi dana yang diberikan pemerintah yang berfungsi sebagai program sosial serta kesejahteraan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku korupsi ini bukan tentang adab dan hukum, akan tetapi memiliki dampak langsung pada mekanisme ekonomi sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah preventif, represif, dan kuratif dalam upaya pemberantasannya.

Selain itu, meningkatnya praktik korupsi turut menyebabkan kenaikan anggaran barang serta jasa, pada akhirnya dapat memicu bertambahnya beban hutang pada negara. Dalam kondisi tersebut, inefisiensi muncul Ketika pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang justru diiringi dengan maraknya praktik korupsi, sehingga bukannya memberikan manfaat positif bagi tata kelola ekonomi, malah menimbulkan negative value added. Sebagai contoh, dana perusahaan yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan produktif dalam siklus ekonomi justru terpaksa digunakan untuk memenuhi birokrasi yang pada akhirnya mengalir ke kepentingan pribadi pejabat yang tidak bertanggung jawab. Jika korupsi semakin meluas, berbagai permasalahan ekonomi akan terjadi secara natural dan tidak terhindarkan. Beberapa dampak ekonomi tersebut antara

lain:

1. Progres ekonomi serta investasi yang melemah
2. Produktifitas yang menurun
3. layanan publik serta rendahnya kualitas barang dan jasa
4. Pendapatan negara yang turun dari sektor pajak
5. hutang negara yang terus meningkat.<sup>6</sup>

Tindak pidana pada bidang ekonomi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki potensi besar untuk memberikan dampak merugikan terhadap stabilitas perekonomian negara. Di antara berbagai jenis kejahatan ekonomi, korupsi adalah hal yang sangat destruktif sebab dapat menimbulkan kerugian negara, baik bentuknya uang, barang, serta jasa. Kerugian tersebut berdampak signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian, antara lain menurunnya kepercayaan investor, melemahnya daya saing produk dalam negeri, serta meningkatnya angka kemiskinan.

Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya kasus korupsi telah menjadi perhatian serius di tingkat global. Korupsi yang terjadi di berbagai level pemerintahan dan sektor ekonomi telah berkembang menjadi ancaman yang mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Meskipun terdapat perbedaan budaya dan sistem politik antarnegara, dampak korupsi tetap bersifat universal dan sangat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis mendalam

<sup>5</sup> Rahmiati,Rina gunawan,Ahmad Thamliha,M.Iqbal Hafiz,Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di indonesia ,Jurnal Mahasiswa Hukum,volume 01 No.01 Juni 2024,Tembilahan Riau ,Hal 23

<sup>6</sup> Prof.Dr.Ir Djoko Santoso,M,Se,Pendidkan Anti Korupsi untuk perguruan tinggi,Kemendikbud cet. Ijakarta (2011),Hal 55-56

mengenai peran hukum pidana ekonomi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi menjadi semakin penting dan mendesak untuk dilakukan.<sup>7</sup>

## 2. Dampak Terhadap pelayanan publik

Korupsi yang meluas memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan. Dalam ranah politik, praktik korupsi menghambat berjalannya demokrasi serta peran pemerintah dalam tata kelola yang baik karena merusak mekanisme formal yang seharusnya berfungsi secara transparan. Korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun lembaga legislatif menurunkan tingkat akuntabilitas serta kualitas representasi dalam perumusan kebijakan publik. Di sektor peradilan, korupsi jelas mengganggu ketertiban dan menghambat pelaksanaan hukum secara adil. Sementara itu, korupsi dalam administrasi pemerintahan menyebabkan ketimpangan dalam pemberian layanan publik.<sup>8</sup>

Indonesia kerap digolongkan sebagai negara dengan angka korupsi yang sangat tinggi. Berbagai laporan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pemberitaan media nasional mengindikasikan adanya kebocoran anggaran baik pada level pemerintah pusat maupun daerah. Temuan data menunjukkan bahwa sekitar Rp166,5 triliun dan USD 62,7 juta dana publik diduga telah hilang akibat praktik korupsi. Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa rata-rata penyimpangan anggaran negara mencapai Rp321,8 triliun setiap tahun, di samping banyaknya kasus yang terindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurut estimasi Soemitro Djojohadikusumo, potensi nilai korupsi bahkan dapat mencapai 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau sekitar Rp1,75 triliun. Tingginya tingkat korupsi tersebut diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, aparat penegak hukum yang rentan terhadap praktik suap, serta budaya penggelembungan anggaran yang sering kali menyebabkan harga proyek dan barang publik menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan standar, namun dengan kualitas yang tidak sebanding. Dalam sektor pelayanan publik, praktik korupsi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling dirugikan melalui keterbatasan saluran pada pelayanan Kesehatan itu serta pendidikan yang harus baik. Publik melihat korupsi ini pada akhirnya menimbulkan situasi yang memungkinkan kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan publik.<sup>9</sup>

Selain itu, korupsi turut menimbulkan ketimpangan dalam sistem hukum. Pelaku korupsi, khususnya mereka yang memiliki kekuasaan politik atau status sosial tinggi, sering memperoleh akses lebih luas terkait perlindungan hukum serta berpotensi mendapatkan keringanan dalam hukum. Akan tetapi, masyarakat pada umumnya yang terdampak pada korupsi sering mengalami hambatan ketika ingin memperoleh sikap yang adil.

Kesejahteraan sosial melihat bahwa korupsi menciptakan lingkungan ditandai menurunnya rasa percaya antaranggota masyarakat itu sendiri. Ketika korupsi merajalela, masyarakat menjadi pesimistis terhadap kemungkinan tercapainya perubahan positif dan keadilan sosial.

<sup>7</sup> Teguh imam santoso, Analisis Tinjau Yuridis Pidana Ekonomi Dalam Penegakan Tindakan pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, Jurnal Beving Vol 02 no 04, Surakarta (2024) Hal 2

<sup>8</sup> Lamijan, Dampak Korupsi Terhadap pembangunan ekonomi Dan Pembangunan Politik, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia vol 3 no 2 (2022) Hal 46

<sup>9</sup> Sukawarsini Djelantik, Korupsi Kemiskinan Dan Masalah Di Negara Berkembang, Jurnal Administrasi Publik, Vol.5, No.1 (2008) Hal 18

Situasi demikian berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi dan lemahnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan mendorong munculnya ketidakpuasan sosial yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

### 3. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Korupsi memberikan akibat yang sangat buruk baik dalam ekonomi maupun sosial bahkan bagi masyarakat miskin, menciptakan konsekuensi berantai yang saling berkaitan. Secara langsung, kelompok masyarakat berpendapatan rendah merasakan peningkatan biaya layanan publik,

menurunnya mutu pelayanan, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Secara tidak langsung, korupsi menyebabkan dialihkannya sumber daya publik yang seharusnya mendukung pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan menjadi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, proses pengurangan kemiskinan menjadi semakin lambat dan kemiskinan secara struktural terus berlanjut.

#### a. Kenaikan Biaya Layanan Publik

Korupsi memicu terbentuknya high cost economy, yakni kondisi di mana biaya ekonomi meningkat akibat praktik penyelewengan kewenangan. Fenomena tersebut umumnya muncul pada negara dengan kontrol pemerintah yang tinggi dan ruang monopoli besar, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan jabatan. Dampaknya, masyarakat harus menanggung biaya jasa dan pelayanan publik yang lebih mahal karena biaya korupsi turut ditanggung dalam struktur harga.

#### b. Lambatnya Penanggulangan Kemiskinan

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan berjalan sangat lambat. Meskipun terjadi penurunan selama satu tahun terhitung dari Maret 2010 – Maret 2011 jumlah masyarakat miskin menurun, hambatan dalam pengentasan kemiskinan masih besar akibat lemahnya pendataan, koordinasi, serta penyalahgunaan anggaran. Korupsi memperburuk keadaan tersebut karena membatasi akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja, pendidikan, modal, dan dukungan sosial yang memadai.

#### c. Terbatasnya Akses untuk Masyarakat Miskin

Praktik korup terus meluas menyebabkan meningkatnya harga kebutuhan pokok dan layanan dasar. Kondisi ini menekan daya beli masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan memperoleh bahan pangan, layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bantuan hukum. Minimnya akses terhadap pendidikan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang menurun sehingga menjebak kelompok miskin dalam siklus kemiskinan.

#### d. Meningkatnya Angka Kriminalitas

Korupsi turut mendorong meningkatnya kejahatan. Ketika korupsi merajalela, pelaku kejahatan lebih mudah menghindari jerat hukum dengan menyuap aparat penegak hukum. Transparency International menegaskan adanya hubungan linear antara tingkat korupsi dan angka kriminalitas: semakin tinggi tingkat korupsi, semakin tinggi pula tingkat kejahatan. Sebaliknya, keberhasilan pemberantasan korupsi meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

---

<sup>10</sup> Rindal, Milatus Shofiyah, Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol.6 No.01 mojokeerto (2023) Hal 8

e. Menurunnya Solidaritas Sosial dan Terjadinya Krisis Moral

Korupsi yang sistemik melemahkan kebersamaan serta kepercayaan disekitar masyarakat. Ketidakpastian masa depan dan ketimpangan ekonomi mendorong masyarakat menjadi lebih individualistis. Praktik bantuan sosial sering kali dimanfaatkan sebagai alat politik, bukan sebagai bentuk empati. Pola ini memicu degradasi moral dan hilangnya nilai keikhlasan, umumnya melihat para generasi muda yang muncul dan terus terkena perilaku manipulatif para elit.<sup>11</sup>

4. Dampak Terhadap Politik Dan Demokrasi

a. Muncul Kepemimpinan yang Koruptif

Ketidakstabilan kondisi politik dan tingginya tingkat praktik korupsi berkontribusi pada terbentuknya pola kepemimpinan yang tidak demokratis. Perilaku koruptif mulai muncul dari tingkat pemerintahan yang paling rendah, di mana dukungan politik diperoleh melalui pemberian suap, bukan berdasarkan kapasitas, integritas, atau rekam jejak calon pemimpin. Proses politik yang bersifat transaksional menciptakan lingkaran setan korupsi, di mana pemimpin yang terpilih pun cenderung koruptif karena proses pemilihannya didasarkan pada pertukaran kepentingan. Dalam situasi ini, masyarakat secara tidak langsung terdorong untuk memilih pemimpin yang melakukan praktik suap sambil diberikan janji-janji kesejahteraan yang belum tentu terealisasi.

b. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi

Sistem demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan elit partai politik. Ketidakpercayaan publik tersebut menciptakan sikap apatis, sehingga masyarakat memandang bahwa keputusan pemerintah tidak lagi mencerminkan kepentingan mereka. Kondisi ini memperlemah hubungan antara pemerintah dan rakyat serta menambah kerentanan sistem demokrasi yang masih relatif muda. Reformasi politik tanpa landasan hukum yang kokoh membuka ruang bagi praktik penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan memunculkan aktor-aktor perantara dan jaringan mafia politik.

3. Dominasi Kelompok Berkuasa secara Ekonomi (Plutokrasi)

Ketika korupsi mengakar dalam sistem pemerintahan, muncul risiko terjadinya plutokrasi, yaitu situasi di mana kekuasaan politik didominasi oleh kelompok atau individu yang memiliki kekuatan modal. Perusahaan besar ataupun pengusaha berpengaruh mampu memengaruhi kebijakan publik melalui transaksi politik dengan pejabat negara. Bahkan, beberapa pengusaha menduduki posisi strategis dalam partai politik, sehingga batas antara kepentingan ekonomi dan politik menjadi kabur. Akibatnya, sektor-sektor strategis seperti energi, pangan, transportasi, perumahan, keuangan, dan media berada di bawah kendali kelompok tertentu. Kondisi ini membuka peluang penyebaran informasi yang bias dan mengancam kohesi sosial.

4. Tergerusnya Kedaulatan Rakyat

Dominasi oligarki dan plutokrasi menyebabkan kedaulatan rakyat semakin terpinggirkan. Sumber daya dan keuntungan negara dinikmati oleh segelintir kelompok elite, sementara kepentingan masyarakat luas terabaikan. Proses politik kemudian digunakan untuk memperkuat kepentingan korporasi besar, sehingga kekuasaan berpindah dari tangan rakyat kepada kelompok tertentu yang mengendalikan kekuatan ekonomi dan politik.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Prof.Dr.Ir Djoko Santoso,M,Se,Pendidkan Anti Korupsi untuk perguruan tinggi,Kemendikbud cet. Ijakarta (2011),Hal 58-60

<sup>12</sup>Ibid ,Hal 63-64

## **KESIMPULAN**

Korupsi merupakan fenomena sistemik yang muncul bukan untuk mencederai bagian dari hukum tetapi menimbulkan disfungsi serius pada peningkatan pembangunan sosial, politik serta ekonomi dalam suatu negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi berdampak langsung pada melemahnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya angka kemiskinan, serta tergerusnya nilai moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Praktik korupsi yang mengakar dalam sistem pemerintahan menciptakan distorsi dalam pengelolaan sumber daya negara dan menimbulkan high cost economy, yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan masyarakat dan proses pembangunan nasional.

Di sektor sosial, korupsi memperparah kesenjangan ekonomi, membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar, dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kriminalitas. Sementara itu, dalam ranah politik, korupsi melahirkan kepemimpinan transaksional, memperkuat dominasi oligarki ekonomi, serta meruntuhkan fondasi demokrasi melalui hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dipandang sebagai upaya penegakan hukum semata, melainkan sebagai agenda fundamental dalam menjaga keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Prof.Dr.Ir Djoko Santoso,M,Se(2011),*Pendidikan Anti Korupsi untuk perguruan tinggi*,cet.1, jakarta : Kemendikbud.
- Sukawarsini Djelantik (2008),*Korupsi Kemiskinan Dan Masalah Di Negara Berkembang*, Jurnal Administrasi Publik ,Vol.5,No.1
- Susi Amalia (2022),*Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di kecamatan Labuan Kabupaten Padeglang*, Banten: Pistemik Indonesia Jurnal Of Sosial And Political Sciensces volume 3 no 1.
- Dwi Atmoko,Amalia Syauket(2022) ,*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*, Jakarta : Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 11 No .2
- Nandha Risky Putra (2022),*Korupsi Diindonesia : Tantangan perubahan Sosial* , Jawa barat ,Integritas : jurnak Anti Korupsi Vol 8 No 1
- Lamijan (2022) ,*Dampak Korupsi Terhadap pembangunan ekonomi Dan Pembangunan Politik*,Jurnal Penelitian Hukum Indonesia vol 3 no 2
- Rindal,Milatus Shofiyah (2023) ,*Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Mojokerto : Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol.6 No.01.
- Teguh imam santoso (2024),*Analisis Tinjau Yuridis Pidana Ekonomi Dalam Penegakan Tindakan pidana Ekonomi Kasus Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara*,Sukarta:Jurnal Beving Vol 02 no 04.
- Rahmiati,Rina gunawan,Ahmad Thamliha,M.Iqbal Hafiz (2024),*Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Di indonesia* , Riau : Jurnal Mahasiswa Hukum,volume 01 No.01
- Layla Hanisa ,Anggun pratiwi,tries ellia sandari (2025),*Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi : Analisis Studi Kasus Di Negara Indonesia*,Jurnal Kendali Akuntansi Volume 3,No .3